



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak

***Correspondence:**

ihyaul@umm.ac.id

DOI: [10.22219/jrak.v13i2.27902](https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.27902)

Citation:

Ulum, I., Leniwati, D., Widyastuti, A., & Oktavendi, T. W. (2023). Intellectual Capital Framework For University Based On Lamemba Accreditation Instrument. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 289-300.

Article Process

Submitted:

July 12, 2023

Reviewed:

August 16, 2023

Revised:

August 19, 2023

Accepted:

August 25, 2023

Published:

August 31, 2023

Office:

Department of Accounting
University of
Muhammadiyah Malang
GKB 2 Floor 3.
Jalan Raya Tlogomas 246,
Malang, East Java,
Indonesia

P-ISSN: 2615-2223

E-ISSN: 2088-0685

Article Type: Research Paper

INTELLECTUAL CAPITAL FRAMEWORK FOR UNIVERSITY BASED ON LAMEMBA ACCREDITATION INSTRUMENT

Ihyaul Ulum^{1*}, Driana Leniwati², Aviani Widyastuti³,
Tri Wahyu Oktavendi⁴

Affiliation:

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

ABSTRACT

Purpose: *The purpose of this research is to construct an intellectual capital framework university (ICFU) based on the accreditation instrument of the LAMEMBA study programme (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi).*

Methodology/approach: *The methods used in this research were focus group discussions (FGD) and in-depth interviews with a number of stakeholders in the implementation of the accreditation of LAMEMBA study programmes.*

Findings: *This research successfully constructed an intellectual capital framework for universities (ICFU) based on the LAMEMBA accreditation instrument.*

Practical implications: *This framework consists of three main components, namely human capital, structural capital, and relational capital with details of the number of each item are: human capital 35 items, structural capital 22 items, and relational capital 8 items.*

KEYWORDS: *Accreditation; Framework; Intellectual Capital; LAMEMBA; University.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi suatu kerangka kerja modal intelektual untuk universitas (*intellectual capital framework university* – ICFU) berdasarkan instrumen akreditasi program studi LAMEMBA (Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi).

Metode/pendekatan: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *focus group discussion* (FGD) dan *indepth interview* bersama sejumlah *stakeholder* dalam pelaksanaan akreditasi program studi LAMEMBA.

Hasil: Penelitian ini berhasil mengkonstruksi sebuah kerangka kerja modal intelektual untuk universitas (ICFU) yang didasarkan pada instrumen akreditasi LAMEMBA. Implikasi praktik: Kerangka kerja ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* dengan rincian jumlah masing-masing item adalah: *human capital* 35 item, *structural capital* 22 item, dan *relational capital* 8 item.

KATA KUNCI: Akreditasi; *Framework*; *Intellectual Capital*; LAMEMBA; Universitas.

PENDAHULUAN

Akreditasi, seperti yang diterapkan dalam dunia pendidikan, adalah pengakuan terhadap sebuah institusi yang memenuhi standar atau kriteria yang ditetapkan oleh lembaga atau asosiasi yang kompeten. Secara umum, tujuannya adalah untuk mempromosikan dan menjamin program pendidikan yang berkualitas tinggi.

Ada beberapa tujuan akreditasi institusi pendidikan tinggi (Blauch, 1959). Tujuan dasarnya adalah untuk mendorong institusi untuk meningkatkan program mereka dengan menyediakan standar atau kriteria yang ditetapkan oleh teman-teman yang kompeten. Tujuan kedua dari hal gila adalah untuk memfasilitasi transfer siswa dari satu institusi ke institusi lain. Perpindahan semacam itu agak luas. Tujuan ketiga dari akreditasi adalah untuk menginformasikan kepada mereka yang memeriksa lulusannya untuk masuk ke praktik profesional tentang kualitas pelatihan yang telah diterima para lulusan.

Tujuan keempat dari akreditasi adalah untuk meningkatkan standar pendidikan untuk praktik suatu profesi. Hampir setiap profesi telah mengadopsi perangkat ini sebagai cara untuk menyarankan bagaimana para praktisi harus dipersiapkan dan jika diperlukan untuk menegakkan ide-idenya. Akhirnya, akreditasi melayani masyarakat umum, karena memberikan panduan kepada orang awam tentang institusi yang mungkin ingin mereka dukung. Daftar kolega dan universitas yang terakreditasi atau disetujui yang dipublikasikan membantu siswa dalam memutuskan institusi mana yang akan dihadiri dan meyakinkannya bahwa jika dia menghadiri institusi yang terakreditasi, dia dapat memperoleh pendidikan dengan kualitas yang baik karena dinilai oleh orang yang kompeten.

Penjaminan mutu dalam pendidikan tinggi telah direformasi dan dikembangkan di seluruh dunia dalam beberapa dekade terakhir sehingga penelitian dan pengajaran di pendidikan tinggi semakin menjadi perhatian global (Filippakou & Tapper, 2008; OECD, 2008; Shah & Do, 2017). Di sebagian besar negara Eropa, institusi pendidikan tinggi (HEI) memfokuskan perhatian mereka pada kinerja, orientasi tujuan, dan efisiensi biaya, sebagai sistem pasar dan kuasi-pasar yang mengadopsi sistem manajerial dan tata kelola dari sektor swasta (Frank et al., 2012).

QA dalam pendidikan tinggi biasanya hanya dalam hal kesesuaian untuk tujuan atau kegagalan untuk uang yang dilakukan oleh pemerintah dan dengan diperkenalkannya biaya

siswa. tetapi mungkin melibatkan beberapa atau semua makna ini. misalnya, dalam menilai sumber daya pembelajaran online untuk kelompok siswa tertentu, jika kualitas pembelajaran adalah kriteria yang menentukan, hal ini dapat dinilai dalam hal tujuan yang dimaksudkan, konten dan desain instruksional, kualitas hasil pembelajaran yang ingin diperoleh dan kapasitas untuk menantang dan mengubah pemahaman siswa ([Chalmers & Johnston, 2012](#)).

Transformasi ini dimulai dengan model *New Management* (NM) dan *New Public Management* (NPM) yang diperkenalkan di Inggris pada tahun 1980-an, meskipun sistem evaluasi Program Studi (SP) yang pertama kali hadir pada tahun-tahun tersebut di Belanda, Prancis ([Van Berkel & Wijnen, 2010](#); [Stura et al., 2019](#)). Penyebaran model manajemen ini sangat berdampak pada Perguruan Tinggi. Menurut [Deem et al. \(2007\)](#), universitas telah berubah dari 'komunitas cendekiawan' menjadi 'tempat kerja', dan sistem-sistem tersebut, yang tadinya hampir jauh dari otonom, "telah menjadi subjek dan target dari 'budaya audit' ([Shah, 2013](#); [Shah & Nair, 2013](#)) dan 'rezim transparansi' yang terkait." Sebagai konsekuensi dari pendekatan baru terhadap manajemen publik, kebutuhan untuk mengendalikan dan mengurangi pengeluaran publik di sektor PT telah berkontribusi pada penyebaran pendekatan evaluasi penelitian dan pengajaran ([Turri, 2014](#)).

NPM, yang terinspirasi dari pengalaman dan praktik sektor nirlaba untuk memperbaiki sektor publik ([Hood, 1995](#); [Deem, 1998](#)), memiliki perbaikan sistem akuntabilitas dan evaluasi sebagai salah satu implikasi operasional utamanya ([Frølich & Caspersen, 2015](#)). Dengan kata lain, tujuan NPM, juga melalui penggunaan alat seperti akreditasi, adalah untuk menggabungkan manfaat perdagangan dalam hal efisiensi dan kebebasan konsumen ([Andreani et al., 2020](#)) dengan manfaat negara dalam hal solidaritas dan hak akses terhadap layanan ([van de Bovenkamp et al., 2013](#)). Dalam konteks PT, sistem akreditasi merupakan, khususnya, alat yang bertujuan untuk membantu transisi dari model kontrol negara ke model pengawasan negara ([Meek & Davies, 2009](#)).

[Andreani et al. \(2020\)](#) menyatakan bahwa fungsi sistem akreditasi nasional adalah untuk memastikan keberadaan persyaratan kualitatif melalui proses evaluasi. Sistem akreditasi sangat luas digunakan ketika penyedia layanan bukan merupakan badan publik yang bertanggung jawab atas biaya layanan dan ketika penyedia layanan memiliki otonomi yang tinggi dari badan pengatur/pembiayaan.

New Institutionalism, yang didasarkan pada dorongan lingkungan dan perilaku organisasi ([DiMaggio & Powell, 1983](#)), menekankan bahwa sistem akreditasi ditujukan untuk mengurangi ketidakpastian yang secara struktural mempengaruhi sektor Pendidikan Tinggi. Tanpa metrik yang jelas dan diakui tentang kualitas dan efektivitas pendidikan, sistem semacam itu hanya akan menjadi stempel kualitas ([Cret, 2011](#)). Dalam pandangan ini, akreditasi dan, secara umum, proses QA ditafsirkan sebagai kasus isomorfisme kelembagaan.

Perkembangan akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia secara legal dan formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 46 undang-undang dimaksud menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan satuan pendidikan pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala dan hasil penilaian diumumkan kepada masyarakat secara terbuka. Berdasarkan amanat UU ini, kemudian dibentuklah BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi). Perkembangan selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 55 ayat 4 UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Atas dasar inilah kemudian, Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM dibentuk.

LAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi secara mandiri. LAM dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan serta dibentuk di tempat kedudukan lembaga layanan pendidikan tinggi. Adapun lembaga mandiri yang dimaksud adalah lembaga independen yang memiliki akta pendirian dari notaris bereputasi, memiliki struktur, dan organ penggerak organisasi, serta elemen pelaksana penilaian akreditasi. Akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan/atau mereka yang memahami hakikat bidang ilmu dan pengelolaan program studi ([LAMEMBA, 2021c](#)).

Akreditasi program studi terlaksana dengan mengintegrasikan berbagai standar dalam Standar Pendidikan Tinggi, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah dengan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses akreditasi LAMEMBA menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA) yang terdiri atas sembilan (9) kriteria. Kriteria-kriteria ini tersusun secara jelas dan komprehensif, saling berinteraksi dalam satu kesatuan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, penyusunan Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA (Instrumen APS EMBA) menggunakan empat (4) karakteristik dasar, yakni berbasis disiplin ilmu EMBA, berbasis visi misi, berbasis luaran dan capaian bidang ilmu EMBA, serta berbasis proses ([LAMEMBA, 2021b](#)).

Penelitian ini berusaha mengkonstruksi *intellectual capital framework universitas* (ICFU) yang didasarkan pada instrumen akreditasi program studi LAMEMBA. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam kajian tentang IC dan akuntabilitas pendidikan tinggi. Universitas adalah institusi yang berbasis pengetahuan ([Leitner et al., 2014](#)), sehingga wajar jika dalam beberapa dekade terakhir ikhtiar untuk menerapkan IC di universitas cukup masif ([Cañibano & Sánchez, 2009](#); [Ulum, 2019](#)) meskipun sebelumnya, IC dikaitkan dengan aktivitas di organisasi bisnis ([Lev, 2001](#); [Antonella & Stefania, 2011](#)).

METODE

Unit analisis penelitian ini adalah Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA. Instrumen ini pada dasarnya mengacu pada IAPS 4.0 yang dikeluarkan oleh BAN-PT ([Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2019](#)). FGD dan *indepth interview* dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu mengkonstruksi *intellectual capital framework* untuk universitas. FGD dilakukan sebanyak dua kali yang melibatkan sejumlah stakeholder yang terkait dengan proses akreditasi dengan instrumen LAMEMBA, antara lain: ketua program studi EMBA, asesor, dan penjamin mutu internal perguruan tinggi. Sementara *indepth interview* dilakukan untuk melakukan pendalaman secara khusus terhadap aspek-aspek krusial dari hasil FGD. Interview dilakukan terhadap sejumlah informan khusus yang memahami kontekstualisasi akreditasi EMBA dan *intellectual capital* (IC).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instrumen Akreditasi LAMEMBA

LAMEMBA adalah Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI) (<https://lamemba.or.id/profil/>). LAMEMBA dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia dalam rangka menghasilkan SDM

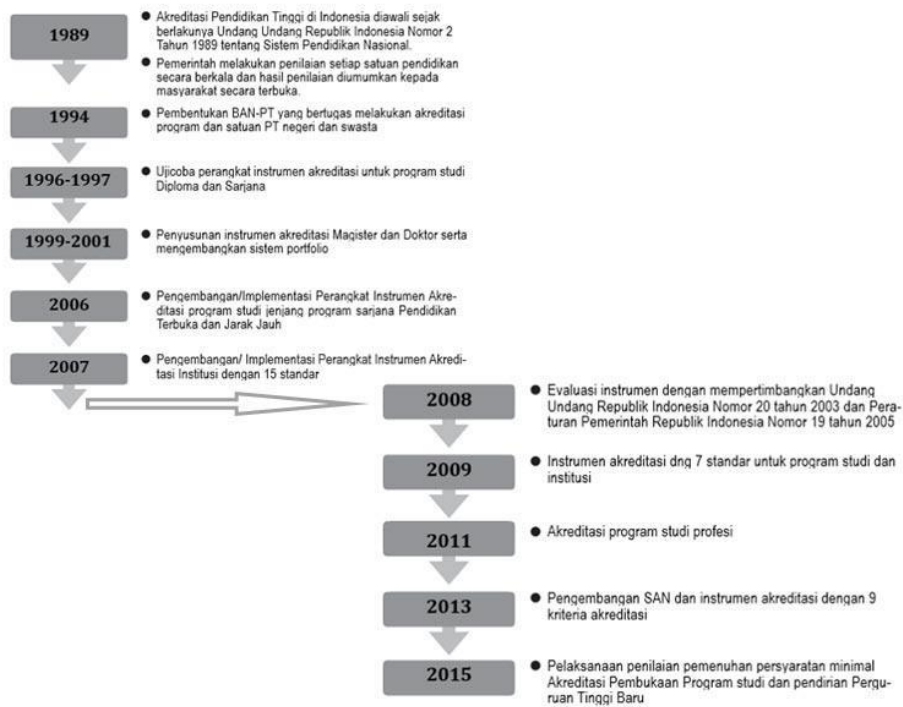
Indonesia yang kompeten dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

293

Instrumen akreditasi program studi (IAPS) yang digunakan oleh LAMEMBA didasarkan pada IAPS 4.0 yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Kaidah yang digunakan dalam mengembangkan penilaian dan instrumen akreditasi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi yang antara lain: 1) Penilaian akreditasi diarahkan pada capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi dan institusi Perguruan Tinggi. 2) Penilaian akreditasi dilakukan secara tuntas dan komprehensif yang mencakup elemen pemenuhan (*compliance*) terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, dan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi, serta konformansi (*conformance*) yang diukur melalui kinerja mutu (*performance*) dalam konteks akuntabilitas publik. 3) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik Program Studi atau institusi Perguruan Tinggi. 4) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sesungguhnya dan sah (*evidence-based*) serta ketertelusuran (*traceability*) dari setiap aspek penilaian ([Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2019](#)).

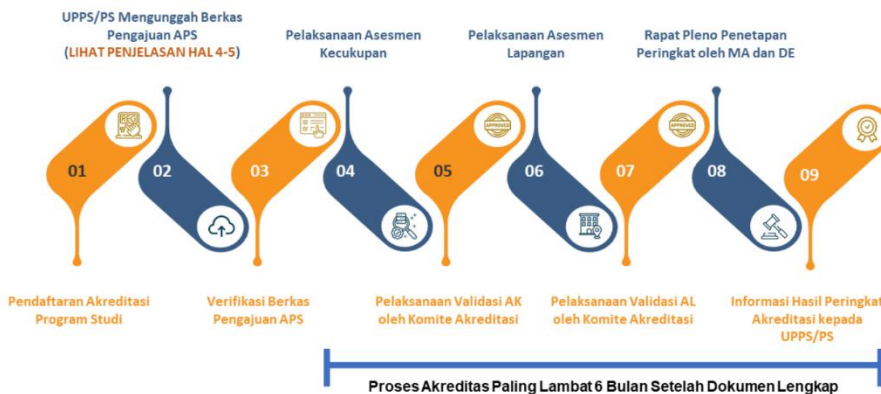
Gambar 1 menjelaskan sejarah perkembangan akreditasi di Indonesia dan IAPS 4.0.

Alur proses akreditasi program studi (PS) LAMEMBA dimulai sejak pendaftaran yang dilakukan oleh PS, dilanjutkan dengan proses verifikasi berkas pendaftaran, hingga informasi hasil peringkat akreditasi kepada UPPS/PS (lihat gambar 2). Dalam konteks ini, LAMEMBA menggaransi bahwa proses akreditasi PS akan berlangsung selama 6 bulan setelah dokumen lengkap.



Gambar 1. Sejarah akreditasi perguruan tinggi di Indonesia dan IAPS 4.0

Sumber: Dimodifikasi dari [dKampus \(2017\)](#) dan ([Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2019](#)).



Gambar 2. Proses Akreditasi Program Studi LAMEMBA

Sumber: <https://lamemba.or.id/alur-tahapan-proses-akreditasi/>

Tabel 1.
Rekapitulasi
Klaster
Dimensi
dan
Indikator
Instrumen
APS EMBA

Klaster	Jumlah Dimensi	Jumlah Indikator
Output dan outcome	6	25
Proses	8	22
Input	7	13
Mutu Kepemimpinan dan Kinerja Tata Kelola	6	14
Total	27	74

Sumber: [LAMEMBA \(2021a\)](#)

B. Deskripsi Data

Istrumen APS LAMEMBA terdiri dari 9 kriteria, yaitu: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Pemong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, 9) Luaran dan Capaian Tridharma. Kesembilan kriteria tersebut kemudian diklaster menjadi 27 dimensi dan 74 indikator (Tabel 1).

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu 2 kali FGD dan 1 kali *indepth interview*. FGD pertama dilakukan untuk mengelaborasi IAPS LAMEMBA dalam kontek IC. Tahap ini menghasilkan draft awal ICFU. FGD kedua dilakukan dengan tujuan untuk finalisasi ICFU. Sementara *indepth interview* dilakukan secara khusus untuk melakukan pendalaman terhadap item-item IC yang dihasilkan dalam ICFU dan memastikan bahwa *framework* tersebut telah konsisten terhadap konsep IC dan IAPS LAMEMBA. Tabel 2 adalah ICFU yang dihasilkan dari dua kali FGD dan 1x *indepth interview*.

No	Human Capital	Structural Capital	Relational Capital
1	Kebijakan dan Prosedur penerimaan mahasiswa	Kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru	Visi Kerjasama regional
2		Kebijakan dan prosedur penerimaan mahasiswa asing	Misi Kerjasama nasional
3		Kebijakan dan prosedur transfer kredit	Tujuan Kerjasama internasional
4		Sistem penerimaan mahasiswa baru	Strategi Penelusuran lulusan
5	Layanan akademik mahasiswa	Tata Pamong	Umpan balik pengguna lulusan
6	Kinerja akademik mahasiswa	Program profesi mahasiswa	Tata Kelola Sistem Manajemen Mutu Internal Persepsi publik terhadap lulusan
7		Sertifikasi kompetensi mahasiswa	Kebijakan SPMI Sumber pendanaan penelitian dari eksternal

No	Human Capital		Structural Capital		Relational Capital
8	Kesejahteraan mahasiswa	Kesejahteraan mental mahasiswa		Manual SPMI	Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat dari eksternal
9		Kesejahteraan fisik mahasiswa		Standar SPMI	
10		Layanan kesehatan fisik		Formulir SPMI	
11		Layanan konseling	Perencanaan, pengeluaran, dan pengelolaan sumber daya keuangan		
12	Pengembangan Karir Mahasiswa		Keberlanjutan sumber daya keuangan		
13	Kecukupan dan Kualifikasi Dosen		Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana fisik		
14	Pengelolaan Dosen	<i>Human resource planning</i>	Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana virtual		
15	Pedoman pelaksanaan penelitian	Rencana dan implementasi pendidikan dosen	Kecukupan dan rencana pengembangan sarana dan prasarana		
16	<i>Roadmap</i> penelitian	Pelatihan dan pengembangan dosen	Peta kurikulum		
17	Kontribusi hasil penelitian	Mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik dosen	Pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran		
18	<i>Roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat	Sertifikasi profesional dosen	Instrumen pengukuran capaian pembelajaran		
19	Kontribusi hasil pengabdian kepada masyarakat	Proses evaluasi dosen	Sumber pendanaan penelitian		
20		Proses promosi dosen	Sumber pendanaan pengabdian kepada masyarakat		
21		Proses penghargaan dosen	Intervensi dan penerapan kurikulum		
22	Kecukupan dan Kependidikan	Kualifikasi Tenaga	Penyesuaian/peninjauan kurikulum		
23	Pengembangan Tenaga Kependidikan	Pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan			

No	Human Capital	Structural Capital	Relational Capital
24	Mekanisme dan prosedur pengembangan karir akademik tenaga kependidikan		
25	Sertifikasi profesional tenaga kependidikan		
26	Penilaian kinerja dosen		
27	Penilaian kinerja tenaga kependidikan		
29	Rekognisi dosen		
30	Prestasi akademik dosen dan mahasiswa		
31	Prestasi non-akademik dosen dan mahasiswa		
32	Profil lulusan		
33	Capaian pembelajaran lulusan		
34	Masa studi mahasiswa		
35	Pekerjaan lulusan		

Tabel 2. Intellectual Capital Framework University (ICFU) berdasarkan IAPS LAMEMBA

D. Pembahasan

Intellectual capital framework university (ICFU) yang dihasilkan dari penelitian ini terdiri dari tiga komponen utama IC – sebagaimana disepakati oleh sebagian besar scholar IC (Sveiby, 1990; Edvinsson & Malone, 1997; Roos & Roos, 1997; Bontis, 1998). Masing-masing komponen dikonstruksi berdasarkan item-item indikator yang ditetapkan oleh LAMEMBA di dalam IAPS-nya. Jumlah indikator IAPS LAMEMBA adalah 74 dalam 27 dimensi. Indikator-indikator tersebut ketika dikonversi ke dalam ICFU terdiri dari 65 indikator, terdiri dari 35 indikator *human capital*, 22 indikator *structural capital*, dan 8 indikator *relational capital*.

Kelompok *human capital* misalnya, indikator dari IAPS LAMEMBA terdiri dari kinerja akademik mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, prestasi akademik dan non-akademik dosen dan mahasiswa, dan lain-lain. Kelompok *structural capital* dikonstruksi dengan indikator visi, misi, tujuan, strategi, tata pamong, tata kelola, dan lain-lain. Sementara komponen *relational capital* terdiri dari indikator kerjasama, penelusuran lulusan, hingga sumber pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.

Sebagaimana beberapa *framework* sejenis yang dikonstruksi sebelumnya (lihat misalnya: Ulum, 2012; Ramirez, 2013; Cricelli et al., 2018; Manes Rossi et al., 2018; Ramirez et al., 2019; Ulum, 2019), ICFU ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan penilaian terhadap modal intelektual yang dimiliki universitas. Pendekatan penelitian yang bisa dilakukan dengan *framework* ini misalnya dengan *seting studi kasus dengan analisis isi (content analysis)*. Teknik analisis ini yang dapat dipertimbangkan ketika menguji pengungkapan IC melalui website perguruan tinggi adalah *six ways numerical coding system*.

Six ways numerical coding system menilai kualitas pengungkapan (bukan hanya kuantitas pengungkapan yang biasanya menggunakan *dummy variable*) melalui website, dengan kriteria sebagai berikut (Ulum, 2019):

0. jika item tidak diungkapkan
1. jika terdapat judul item, tetapi tidak ada isinya
2. jika item diungkapkan dalam format narasi
3. jika item diungkapkan dalam format angka
4. jika item diungkapkan dalam format satuan moneter
5. jika item diungkapkan dalam format grafik/chart/gambar

SIMPULAN

ICFU (intellectual capital framework university) yang dihasilkan dari penelitian ini merupakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi pengungkapan modal intelektual universitas. Kerangka kerja ini dikonstruksi berdasarkan instrumen akreditasi program studi LAMEMBA. Pengembangan ICFU ini selaras dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang merupakan ruh dari diberlakukannya akreditasi.

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa dokumen akreditasi program studi seringkali merupakan dokumen 'rahasia' bagi PS, sehingga agak sulit untuk bisa mengakses dokumen tersebut bagi stakeholder eksternal. Jika peneliti selanjutnya menggunakan ICFU ini dan bisa memperoleh dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi indikator-indikator di dalam framework ini, maka stakeholder lainnya dapat turut memantau kinerja universitas tersebut dari laporan penelitian atau publikasiannya.

REFERENSI

- Andreani, M., D. Russo, S. Salini, & M. Turri. 2020. "Shadows over accreditation in higher education: Some quantitative evidence". *Journal of Higher Education*, Vol. 79, No., hlm: 691-709.
- Antonella, S., & V. Stefania. 2011. "The intellectual capital report within universities: comparing experiences". *European Integration*, Vol., No., hlm: 618-624.
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2019. "Peraaturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi".
- Blauch, L. E. 1959. *Accreditation in higher education*: US Department of Health, Education, and Welfare, Office of Education.
- Bontis, N. 1998. "Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models". *Management Decision*, Vol. 36, No. 2, hlm: 63-76.
- Cañibano, L., & M. P. Sánchez. 2009. "Intangibles in universities: current challenges for measuring and reporting". *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, Vol. 13, No. 2, hlm: 93-104.
- Chalmers, D., & S. Johnston. 2012. "Quality assurance and accreditation in higher education". Pada *Quality assurance accreditation in distance education e-learning: models, policies research*, diedit oleh I. Jung & C. Latchem. London: Routledge, 1-12.

Cret, B. 2011. "Accreditations as local management tools". *Higher Education*, Vol. 61, No., hlm: 415-429.

299

Cricelli, L., M. Greco, M. Grimaldi, & L. P. L. Dueñas. 2018. "Intellectual capital and university performance in emerging countries: Evidence from Colombian public universities". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 19, No. 1, hlm: 71-95.

Deem, R. 1998. "'New managerialism' and higher education: The management of performances and cultures in universities in the United Kingdom". *International Studies in Sociology of Education*, Vol. 8, No. 1, hlm: 47-70.

Deem, R., S. Hillyard, M. Reed, & M. Reed. 2007. *Knowledge, higher education, and the new managerialism: The changing management of UK universities*: Oxford University Press.

DiMaggio, P., & W. W. Powell. 1983. "The iron cage revisited: Collective rationality and institutional isomorphism in organizational fields". *American sociological review*, Vol. 48, No. 2, hlm: 147-160.

dKampus. 2017. "Perkembangan Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia" <https://www.dkampus.com/2017/04/perkembangan-akreditasi-pendidikan-tinggi/>. [diakses pada 12 Juli 2023].

Edvinsson, L., & M. S. Malone. 1997. *Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower*. New York: HarperCollins.

Filippakou, O., & T. Tapper. 2008. "Quality assurance and quality enhancement in higher education: contested territories?". *Journal of Higher Education Quarterly*, Vol. 62, No. 1-2, hlm: 84-100.

Frank, A., D. Kurth, & I. Mironowicz. 2012. "Accreditation and quality assurance for professional degree programmes: comparing approaches in three European countries". *Journal of Quality in Higher Education*, Vol. 18, No. 1, hlm: 75-95.

Frølich, N., & J. Caspersen. 2015. "Institutional governance structures". Pada *The Palgrave international handbook of higher education policy and governance*, diedit oleh S.-O. M.: Springer, 379-397.

Hood, C. 1995. "The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme". *Journal of Accounting, Organizations and Society*, Vol. 20, No. 2-3, hlm: 93-109.

LAMEMBA. 2021a. "Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA - Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA". Jakarta. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi.

———. 2021b. "Kriteria dan Prosedur Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA". Jakarta. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.

———. 2021c. "Naskah Akademik Instrumen Akreditasi LAMEMBA". Jakarta. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi.

Leitner, K. H., A. Curaj, S. Elena-Perez, J. Fazlagic, K. Kalemis, Z. Martinaitis, G. Secundo, M. A. Sicilia, & K. Zaks. 2014. *A Strategic Approach for Intellectual Capital Management in European Universities: Guidelines for Implementation*. Bucharest: UEFISCDI.

Lev, B. 2001. *Intangibles: management, measurement, and reporting*. Washington: The Brookings Institution.

- Manes Rossi, F., G. Nicolò, & P. Tartaglia Polcini. 2018. "New trends in intellectual capital reporting: Exploring online intellectual capital disclosure in Italian universities". *Journal of Intellectual Capital*, Vol. 19, No. 4, hlm: 814-835.
- Meek, V. L., & D. Davies. 2009. "Policy dynamics in higher education and research: Concepts and observations". Pada *Higher education, research innovation: Changing dynamics* diedit oleh V. L. Meek.
- OECD. 2008. *Higher education to 2030: volume 1: demography*: OECD, Paris, France.
- Ramírez, Y. 2013. "Importance of intellectual capital disclosure in Spanish universities". *Intangible Capital*, Vol. 9, No. 3, hlm.
- Ramirez, Y., E. Merino, & M. Manzaneque. 2019. "Examining the intellectual capital web reporting by Spanish universities". *Online Information Review*, Vol. 43, No. 5, hlm: 775-798.
- Roos, G., & J. Roos. 1997. "Measuring your Company's intellectual performance". *Long Range Planning*, Vol. 30, No. 3, hlm: 413-426.
- Shah, M. 2013. "The effectiveness of external quality audits: a study of Australian universities". *Quality in Higher education*, Vol. 19, No. 3, hlm: 358-375.
- Shah, M., & Q. T. Do. 2017. *The rise of quality assurance in Asian higher education*: Chandos Publishing.
- Shah, M., & C. S. Nair. 2013. *External Quality Audit: Has it improved quality assurance in universities?*: Elsevier.
- Stura, I., T. Gentile, G. Migliaretti, & E. Vesce. 2019. "Accreditation in higher education: Does disciplinary matter?". *Journal of Studies in educational evaluation*, Vol. 63, No., hlm: 41-47.
- Sveiby, K. E., ed. 1990. *The Invisible Balance Sheet; Key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies*. Sweden: The Konrad Group.
- Turri, M. 2014. "The new Italian agency for the evaluation of the university system (ANVUR): a need for governance or legitimacy?". *Quality in Higher education*, Vol. 20, No. 1, hlm: 64-82.
- Ulum, I. 2012. "Konstruksi Komponen Intellectual Capital untuk Perguruan Tinggi di Indonesia". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 2, hlm: 251-262.
- . 2019. "Intellectual capital framework perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan instrumen akreditasi program studi (IAPS) 4.0". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9, No. 3, hlm: 309-318.
- Van Berkel, H., & W. Wijnen. 2010. "Accreditation in the Netherlands: does accountability improve educational quality?". *Research in Comparative International Education*, Vol. 5, No. 1, hlm: 88-97.
- van de Bovenkamp, H., H. Vollaard, M. Trappenburg, & K. Grit. 2013. "Voice and choice by delegation". *Journal of Health Politics, Policy Law*, Vol. 38, No. 1, hlm: 57-87.